

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : Dina Aulia

dinaauliadinaa@gmail.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The village information system program is a village empowerment program as stated in the regulations regent of kuantan singingi regency. This program is a set of data and information utilization process tools to find out how the management of the village. The problems that occur in the village are still not in accordance with the contents of the kuantan singingi number 57 of 2017. where there are still village that have not implemented a village information system program there are only 10 village that have website, the use of wifi is not in accordance with the contents of the regent regulation, not all village information system content is contained in the onion river village website. information system program in Kuantan Singingi Regency and the factor that inhibit it. The theory used is G.R Terry in Badrudin, Terry in Badrudin, namely there are four indicators that influence management: planning, organizing, implementing, controlling. This study uses secondary qualitative research types obtained though observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: first, the management of the village information system program in kuantan singingi regency is not yet optimal because still lack of socialization. Second, the factors that hampered the management program of the village information system program in kuantan singingi regency namely: human resources, budget, and facilities/infrastructure.

Keywords: Management, Program

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi desa untuk meningkatkan Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi akan bermuara pada meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan kualitas produk. Kebijakan ini akan bermakna manakala dikaitkan dengan upaya pemenuhan layanan Pemerintah Desa yang Sistem Informasi Desa merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem Informasi Desa ini terpasang di setiap kantor kepala desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Bermutu, kepercayaan masyarakat, mempermudah pekerjaan, dan aparatur yang bermutu pula. Terkait dengan konteks kekinian, pemanfaatan Sistem Informasi Desa dalam pelaksanaan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi Pemerintahan Desa, pengelolaan sistem informasi dalam pelayanan Pemerintahan Desa sudah tentu bisa dikatakan sangat tepat. Pada prakteknya, hampir bisa ditemui di banyak Pemerintah Desa menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) bisa didapati dengan berbagai bentuk, baik yang sangat sederhana bahkan sampai dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi.

Pengelolaan Sistem Informasi Desa tingkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Sistem Informasi Desa dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari unsur

perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pengelola Sistem Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 8 bertugas sebagai berikut:

- a. Memasukkan data;
- b. Memperbaharui data;
- c. Mempublikasikan data dan informasi;
- d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
- e. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.

Keterbatasan Sumberdaya manusia khususnya aparatur desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa yang belum memahami bagaimana kewajiban dan tanggungjawab mereka dalam pelaksanaan program Sistem Informasi Desa, Proses pelayanan administrasi masih menggunakan cara konvensional dan belum bisa dilakukan melalui *website* Desa. Seharusnya dengan diterapkannya program SID pelayanan administrasi bisa dilakukan melalui *website* tersebut dan akan memperpendek jarak birokrasi sehingga lebih efektif dan efisien.

Manfaat program SID yaitu memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala, serta mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Sedangkan fungsi dan muatan program SID yang tertuang dalam pasal 6 yaitu sebagai :

1. Media penyimpanan dan pengelolaan data (potensi desa, pendidikan, kesehatan, kependudukan, data kemiskinan, pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, keuangan, ekonomi, data sosial budaya, pemerintahan desa & data lain sesuai kebutuhan) yakni mengelola dan menyebar luaskan SID sesuai perundangan;
2. Media informasi dan komunikasi pemerintahan desa, yakni semua informasi desa yang dapat di akses oleh masyarakat

dengan menyediakan perangkat SID; menerbitkan informasi secara berkala minimal 6 bulan sekali (informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dll). Serta media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

3. Layanan administrasi serta pengelolaan keuangan desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Sistem Informasi Desa di Desa Sungai Bawang yang merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) dan pihak ketiga sebagai fasilitator adalah PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+) dengan Kelompok Sasarannya adalah Organisasi Pemerintah Desa dan masyarakat. Tanggung jawab DSPMD yakni bertanggung jawab dalam hal administrasi seperti mengkoordinasikan pengembangan SID, membina pengelola SID, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), dan memberikan informasi kepada desa melalui SID. DKISP bertanggung jawab mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan pedesaan serta mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten.

Sedangkan PT. ICON+ sebagai fasilitator yang menyediakan *wifi*, *website* domain *desa.id* serta memberikan pelatihan aparatur desa (admin dan operator desa). Sumber pendanaan program SID untuk pihak desa dianggarkan dalam APBDDes sebesar 36.000.000/tahun sedangkan yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 218 Desa dan 11 kelurahan. Sejak diberlakukan kebijakan SID ada 183 desa yang telah

menerapkan program SID dan 35 desa yang belum menerapkan program SID seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Sedangkan untuk tahap pemberian *website* dengan domain “*desa.id*” oleh pihak fasilitator belum ada di realisasikan.

Tabel 1.1 Daftar desa yang telah memasang dan yang belum memasang (*wifi*) di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Yang telah memasang (<i>wifi</i>)	Yang belum memasang (<i>wifi</i>)
1.	Pucuk Rantau	9 desa	1 desa
2.	Gunung Toar	14 desa	-
3.	Singingi	12 desa	1 desa
4.	Singingi Hilir	12 desa	-
5.	Kuantan Tengah	3 desa	16 desa
6.	Kuantan Mudik	23 desa	1 desa
7.	Kuantan Hilir	11 desa	3 desa
8.	Hulu Kuantan	11 desa	1 desa
9.	Cerenti	5 desa	6 desa
10.	Benai	14 desa	1 desa
11.	Sentajo Raya	13 desa	1 desa
12.	Kuantan Hilir Seberang	12 desa	2 desa
13.	Logas Tanah Darat	15 desa	-
14.	Inuman	12 desa	2 desa
15.	Pangean	17 desa	-
Total klasifikasi		183 desa	35 desa
Total Keseluruhan		218 desa	

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Kecamatan Singingi merupakan kecamatan yang yang 12 desanya telah menerapkan program SID dan memiliki 1 desa ex-transmigrasi yang telah memiliki *website* desa yaitu desa Sungai Bawang dengan link www.sungaibawang.com bahkan sebelum masuk program SID yang dibuat oleh pemuda desa setempat. Dan hanya ada 1 desa asli yang belum menerapkan program SID yaitu desa Pangkalan Indarung.

Adapun realisasi program SID yang ada dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Bawang belum menjalankan sepenuhnya program SID seperti terlihat dalam fenomena berikut ini:

1. Tidak semua desa menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID). Hanya ada 183 desa dari 218 desa yang menerapkan program ini. Padahal dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa Pasal 15 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa telah menerapkan SID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan oktober

tahun 2017. Hanya ada 10 desa yang memiliki *website* dari 183 desa yang telah menerapkan program Sistem Informasi Desa (SID).

2. Proses penyimpanan dan pengelolaan data tidak semua data terdapat dalam *website* Sungai Bawang. Dalam *website* tersebut hanya memuat profil desa, pemerinah desa, data kependudukan desa, berita desa, produk desa, dan peraturan desa dari yang seharusnya data potensi desa, data pendidikan, data kesehatan, data kependudukan, data kemiskinan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan, data ekonomi, data sosial budaya, data pemerintahan desa serta lainnya sesuai kebutuhan juga harus termuat dalam *website* desa tersebut. Padahal seharusnya dengan adanya pengelolaan data ini otomatis akan memudahkan masyarakat maupun kelompok kepentingan dalam mencari data sesuai dengan kebutuhan pihak tersebut.
3. Tidak semua muatan Sistem Informasi Desa termuat dalam *website* Desa Sungai Bawang. Dalam *website* tersebut hanya memuat profil desa, pemerintahan desa, data kependudukan desa, berita desa, produk desa, dan peraturan desa dari yang seharusnya data potensi desa, data pendidikan, data kesehatan, data kependudukan, data kemiskinan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan pedesaan, data keuangan, data ekonomi, data sosial budaya, data pemerintahan desa serta data lain sesuai kebutuhan juga harus termuat dalam *website* desa tersebut. Padahal seharusnya dengan adanya pengelolaan data ini otomatis akan memudahkan masyarakat maupun kelompok kepentingan dalam mencari data sesuai dengan kebutuhan pihak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Sistem Informasi di Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Sistem Informasi Desa Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Sistem Informasi Desa Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak lain yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama terutama di program studi Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehubungan dengan pengelolaan program Sistem Informasi Desa (SID).

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

George R.Terry dalam Badrudin (2014:16) mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang pas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. Untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan dukungan manajemen

dengan fungsi sesuai dengan kebutuhan.

Handoko dalam Ritonga (2015:27) mengatakan manajemen dikatakan sebagai suatu seni, maka hal itu menunjukkan kemampuan melakukan kegiatan manajemen adalah keterampilan pribadi, sehingga tidak bisa berlaku secara umum. Untuk lebih tepat adalah manajemen sebagai suatu proses. Dengan demikian, semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Kegiatan-kegiatan tertentu inilah yang disebut fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* dan seterusnya.

Sedangkan fungsi-fungsi dasar manajemen menurut Terry dalam Badrudin (2017:14), yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) atau biasa yang disingkat dengan POAC. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk mencapainya. Enam jenis rencana didalam mana termasuk prosedur, metode, standar, anggaran, program, dan faktorteknis.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah stuktur organisasi yang dapat dianggap sebagai sebuah kerangka yang merupakan titik pusat sekitar apa manusia dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata

lain, salah satu bagian penting tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan suatu kelompok orang-orang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu.

3. Pelaksanaan (*actuating*) adalah merupakan fungsi fundamental manajemen ketiga yang akan dibahas secara agak terperinci. Pengarahan (*actuating*) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran anggota-anggota organisasi tersebut. Hal dasar bagi tindakan pengarahan adalah manajemen yang berpandangan positif, maksud nya para manajer harus menunjukkan melauikelakuan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk anggota-anggota organisasi mereka.
4. Pengawasan (*controlling*) adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang direncanakan. Maka oleh karenanya fungsi pengawsan perlu dilakukan. Tetapi adalah penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan artinya: ia harus mengusahakan terjadinya hal-haltertentu, maksudnya mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakankegagalan pengawasan berarti cepat atau lambatnya kegagalan perencanaan-perencanaan dansuksesnya pengawasan.

2.2 Pengelolaan

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Balderton dalam Adisasmita (2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Wardoyo (2011:41) pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk dapat menunjang kegiatan manajerial dan kinerja dalam bidang apapun. Setiap organisasi pasti memiliki sistem informasinya sendiri (Silvana, 2015).

Sistem Informasi Desa adalah perangkat kerja/alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas di tingkat desa dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sistem informasi desa terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat berbasis teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan komunitas/masyarakat di tingkat desa. Sebagai sebuah sistem informasi, data dan informasi adalah isi/konten yang menjadi bahan utama yang dikelola dalam sistem informasi desa. (Hermansyah, 2015).

Sistem informasi memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang berasal dari hasil pengolahan data menjadi bentuk

yang berguna bagi pemakainya. Komponen - komponen yang terdapat dalam sistem informasi yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data dan komponen kontrol.

1. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi sebagai bahan dasar dalam pengolahan informasi.
2. Komponen model merupakan kombinasi dari prosedur, logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
3. Komponen output atau keluaran merupakan hasil dari sistem informasi yang merupakan informasi dan dokumentasi yang berguna bagi pemakai sistem.
4. Komponen teknologi merupakan alat dalam sistem informasi untuk menerima input, menjalankan model, menyompan, mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian keseluruhan sistem.
5. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain yang disimpan untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut.
6. Komponen kontrol yang diperlukan untuk menjamin kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi serta mencegah kerusakan dan kesalahan sistem informasi (Sutabri, 2004 : 42- 45)

2.4 E-Government

E-govemment menurut Prasojo, et.al (2007:82) didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif, telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Ada tiga cara dalam mengklasifikasi *e-government* menurut

Cahyana (2004:4):

1. Proses otomatisasi, yakni mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, *processing*, output dan mengirimkan informasi.
2. Proses informasi, yakni mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung arus proses pengam-bilan keputusan, komunikasi dan kualitas pelayanan.
3. Proses transformasi, yakni membuat ICT baru. Untuk menjalankan proses informasi/mendukung proses informasi, misal membuat metode baru dalam pelayanan publik.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif pendekatan fenomenologi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, PT. Indonesia Comnetss Plus (ICON+), Desa Sungai Bawang. Alasan memilih lokasi ini karena DSPMD dan DKISP merupakan yang bertanggung jawab dalam program Sistem Informasi Desa , PT. ICON+ merupakan pihak fasilitator program Sistem Informasi Desa, Desa Sungai Bawang merupakan desa ex-transmigrasi yang terletak di kecamatan singing dan telah menerapkan program Sistem Informasi Desa serta telah memiliki *website* “sungaibawang.com”.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui masalah penelitian. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah:

1. Seksi Keuangan dan Aset Desa DSPMD Kabupaten Kuantan Singingi
2. Seksi Media Informasi DKISP Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bidang Pemasaran PT. ICON+ Pekanbaru
4. Kasi Pemerintahan Desa Sungai Bawang

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak lain melalui wawancara serta pengamatan langsung. terkait pengelolaan program Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan sebagai karena pendukung untuk memahami masalah yang diteliti yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

Gambaran umum tentang Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, Fungsi dan tugas setiap bidang Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar desa yang telah dan yang belum memiliki internet desa (wifi) di Kabupaten Kuantan Singgi, Daftar desa yang memiliki website

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, terdiri dari:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi ini penulis lakukan dalam upaya menggali informasi tentang pengelolaan program SID di Kabupaten Kuantan Singingi. Observasi dilaksanakan dari tanggal 20 Desember 2018 sampai 22 Juli 2019.

b. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara langsung secara mendalam terhadap informan yang

mengetahui tentang pengelolaan program SID Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil wawancara berbeda tersebut di analisis secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan dari tanggal 20 Desember 2018 sampai 22 Juli 2019 dengan merekam mencatat informasi yang didapat.

c. Dokumentasi

Penulis mengambil data yang bersumber dari dokumen yang didapat dari informan yang ada hubungannya dengan pengelolaan program SID di Kabupaten Kuantan Singingi berupa file, foto, buku profil, laporan akhir dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumen pribadi yang diberikan oleh instansi dan pihak yang terkait didalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dari 20 Desember 2018 sampai 22 Juli 2019.

3.6 Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data *interactive* dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, digambarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam kepada informan dan dilanjutkan dengan langkah dokumentasi yaitu dengan meminta dokumen terkait program SID kepada DSPMD, DKISP, Desa Sungai Bawang.
2. Mereduksi data dengan memfokuskan pengelolaan program SID pada DSPMD, DKISP, PT.ICON+, Pemdes Sungai Bawang dan Pemdes.
3. Menyajikan data terkait pengelolaan program SID menggunakan teks naratif. Dan selanjutnya mencari faktor yang penghambat tidak terwujudnya pengelolaan program SID yang optimal

untuk dianalisis kemudian dikategorikan dan disajikan dalam bentuk gambar.

4. Menyimpulkan setelah menemukan faktor penghambat pengelolaan program SID.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan pemillihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Program SID ini adalah telah diterapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) program Sistem Informasi Desa. Dalam menerapkan program Sistem Informasi Desa prosedur yang harus dilalui sesuai dengan SOP Sistem Informasi Desa yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Adapun perencanaan yang dijadikan patokan program Sistem Informasi Desa dilapangan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) program Sistem Informasi Desa.

Adapun perencanaan dalam program Sistem Informasi Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa (SID) adalah pemerintah desa dan masyarakat. Jika ditinjau dari segi kelompok perencanaan, program Sistem Informasi Desa dinilai belum tepat sasaran hal ini dikarenakan tidak semua Pemerintah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan program Sistem Informasi Desa. Hanya ada 183 dari 218 desa yang telah menerapkan program SID, sementara 35 desa lainnya belum menerapkan.

4.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilakukan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk didalamnya unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Tujuan untuk organisasi ini ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif. Program Sistem Informasi Desa ini merupakan program dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dibawah tanggung jawab dari DSPMD dan sebagai pelaksanaannya DKISP sedangkan yang menyediakan sarana prasarana penunjang program ini adalah PT. ICON+.

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan tercapai. Komunikasi yang dijalankan pengelolaan kurang intens dimana tidak ada rapat koordinasi lanjutan membahas perkembangan program SID. Kelompok sasaran dalam hal ini Pemerintah Desa Sungai Bawang juga mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak ketiga (ICON+). Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi pengelolaan program SID. pengelolaan (DSPMD dan DKISP) komitmen akan menjalankan program SID, namun bentuk komitmen DSPMD sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara nyata, hal ini terlihat dimana sejak disahkannya Peraturan Bupati tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun berjalan program ini belum ada perkembangan.

5.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap orang-orang yang sesuai dengan rencana dan organisasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi penting dari manajemen, karena pada fungsi ini sebuah organisasi melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitasnya, agar organisasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi-misidari organisasi. Respon yang diberikan terhadap

pelaksanaan program Sistem Informasi Desa yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. pemerintah menginginkan program Sistem Informasi Desa terlaksana namun tidak diimbangi dengan kesiapan dalam mempersiapkan segala sumberdaya yang dibutuhkan.

Pemerintah dalam menjalankan program Sistem Informasi Desa. pendanaan program Sistem Informasi Desa. Mereka tidak memiliki kendala berarti karena memiliki sumber pendanaan yang jelas yaitu Dana Desa. Namun mereka mengecewakan terhadap sikap pihak ketiga dalam hal ini ICON+ yang kurang bertanggung jawab.

5.1.4 Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial setelah perencanaan pengelolaan dalam manajemen, sama halnya dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan mengevaluasi kinerja diantaranya melakukan koreksi pengawasan akan diperoleh gambaran apakah pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi prosedur yang disepakati dan ditetapkan termasuk perkembangan dan kemajuan yang telah tercapai. Program Sistem Informasi ini belum ada pengawasan yang dilakukan nya karena program ini masih berjalan begitu saja padahal pemerintah telah menetapkan standar dalam program Sistem Informasi Desa ini yaitu Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa dan SOP. Mereka belum ada mengevaluasi program Sistem Informasi Desa ini karena ini masih tahap awal.

5.2 Faktor-Faktor yang Menghambat pengelolaan Program Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting sebagai penggerak dalam menjalankan program SID. Terkait dengan

sumberdaya manusia DSPMD belum mencukupi begitu juga dengan sumber daya manusia Pemerintah Desa Sungai Bawang yang terbatas yang saat ini *website* desa dipegang oleh Kasi Pemerintahan yang merangkap jabatan karna tidak adanya admini dan operator desa. Selain itu dilihat dari kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Sungai Bawang juga belum memadai. Dimana hanya ada dua aparatur desa yang memahami teknologi informasi.

Sumberdaya Manusia juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi dalam mengelola program Sistem Informasi Desa. pemerintah desa mengupdate kebijakan Sistem Informasi Desa dalam perealisasi program Sistem Informasi Desa hanya berpatokan pada Peraturan Bupati No.57 tahun 2017 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Desa sementara untuk kebijakan turunannya sendiri tidak ada baik itu bentuk proyek maupun kegiatan dari kebijakan Sistem Informasi Desa itu sendiri. Hal ini terlihat dimana dalam perelisasiannya pihak pemerintah dalam hal ini DSPMD tidak menganggarkan kedalam APBD tahun 2018 /2019 dan hanya menjalankan sambil berlalu dan tidak memiliki target capaian.

5.2.2 Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program, penyusunan anggaran menjadi hal yang penting dalam sebuah proses perencanaan, karena anggaran merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu program/kegiatan oleh karena itu dana harus tercapai dalam organisasi terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Desa. Anggaran yang didapatkan kemudian diolah dan di bagi-bagi untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, seperti dalam perbaikan /pengadaan sarana/prasarana yang dilakukan

secara bertahap pada program Sistem Informasi Desa yang menjadi tanggung jawab sebagai pengelola

Anggaran dalam pengelolaan dari dana APBDes melakukan pengelolaan menggunakan anggaran yang ada dengan semaksimal mungkin.

5.2.3 Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana dilakukan untuk memperbaharui dan memperbaiki kembali fasilitas Sistem Informasi Desa yang telah rusak. Sarana/Prasarana ini dilaksanakan berdasarkan prosedur dan juga berdasarkan pada anggaran yang ada. Sarana/Prasarana yang rusak seperti komputer dan jaringan *Fiber Optik* di kantor dinas, sama halnya dengan yang terjadi di Desa Sungai Bawang pemerintah desa kekurangan komputer dan alat pendukung lainnya.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai pengelolaan program Sistem Informasi Desa oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Maka terdapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pengelolaan yang dilakukan belum terlaksanakan dengan optimal. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Bupati dan SOP nya namun untuk kegiatan turunannya belum ada dan pengorganisasian program SID ini sudah ada TUPOKSI nya sudah tertuang dalam Perbup namun perealisasiannya mereka belum menjalankan secara optimal, akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa masih belum berjalan optimal, meskipun Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan SOP akan tetapi belum terlaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk

pelaksanaan pengadaan sarana/prasarana dianggarkan dalam APBD Kuantan Singingi. Belum ada Pengawasan yang dilakukan oleh DSPMD dan DKISP terhadap pengelolaan Sistem Informasi Desa belum ada pengawasan yang dilakukannya.

2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan program Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurang nya sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa. keterbatasan anggaran yang disediakan. Kurangnya sarana/prasarana yang memadai seperti jaringan yang disalurkan melalui Fiber Optik dan komputer.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran penulis dalam pengelolaan program Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian serta pihak fasilitator PT.ICON+ diharapkan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (Pemerintah Desa) agar sumberdaya yang dibutuhkan memadai, mengupdate kebijakan Sistem Informasi Desa (SID), mengagendakannya dalam APBD melalui kebijakan turunan dalam bentuk proyek dan kegiatan agar tujuan kebijakan tersebut tercapai serta meningkatkan pemahamannya terkait program Sistem Informai Desa agar tidak tumpang tindih dalam menjalan tupoksi kerja nya masing-masing. Pihak ketiga dan kelompok sasaran diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan melakukan komunikasi tertarah agar tidak terjadi tumpang tidih informasi ataupun miss komunikasi serta agar satu komando.

2. Adapun saran terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa adalah sebagai berikut ini:

- a. Pemerintah diharapkan dapat menambah anggaran terhadap pengelolaan Sistem Informasi Desa agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
- b. Pemerintah Desa Sungai Bawang harus melakukan penambahan sumber daya manusia, sehingga cela kekosongan yang terjadi di kantor dapat terisis agar tidak terjadinya tumpang tindih tanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik. Akan lebih baik lagi jika memberikan pelatihan bagi pegawai kantor agar bekerja dengan maksimal
- c. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menambah dan melengkapi sarana/prasaranan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan Sistem Informasi Desa dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa. Sarana/prasarana sangat diperlukan demi terlaksannya pengelolaan SID.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Athoillah, Anon. 2010. *Dasar_dasar Manajemen*. Bandung: C.V Pustaka Setia.
- Badrudin. 2017. *Dasar_dasar Manajemen*. Bandung: C.V Alfaber.
- Brantas. 2009. *Mengenal manajemen organisasi*. Jakarta: Yudistira.

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Depok, Rajagrafind Pustaka.

Effendi, Usman. 2015. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Ibrahim. 2016. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: C.V Alfaber.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.

Karyoto. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Nawawi, Hadari, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Marnis. 2008. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru. Unri Press.

Mulyono., 2008, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Prasojo, Eko. 2007. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance, Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Indonesia.

Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).

Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen Cetakan Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen (Penerjemah J. Smith D.F.M)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibowo, 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wilujeng, sri. 2007, *pengantar manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Internet:

Badan Pusat Statistik. 2016, Kuantan Singingi dalam Kependudukan: BPS (Diakses 20 Maret 2019, 20:00)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*program*”. Diakses dari <https://kbbi.web.id/program>. (Diakses 20 Juli 2019, 20.00)

Jurnal

Antonio, H., & Safriadi, N. 2012. *Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Informatika (SI-ADIF)*. Jurnal ELKHA Vol. 4 No. 2 Oktober 2012.

Arita, Triyani Fitri¹, Torkis Nasution² Herwin. 2015. *Pengembang Model Pelayanan Kantor Desa terhadap Masyarakat Berbasis Mobile Computing*. Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) Vol. 1, No. 2.

Daryono. 2013. *Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintah Desa Model e-Government Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Universitas Jenderal Soedirman.

Hemansyah. 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. ejournal Pemerintahan Integratif, 351

Hidayatulloh, Syarif. Ciske, Mulyadi. 2015. *Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web*. Jurnal IT CIDA Vol 1 No. 1 Desember 2015 54 ISSN: 2477_8133 e-ISSN: 2477_8125.

Noviyanto, Fiftin. Tedy Setiadi, Iis Wahyuning-Sih.² 014. *Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile*. Jurnal Informatika Vol. 8, No.1, Januari 2014.

Sulismadi, Wahyudi, Muslimin. 2016. *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis e-Government Pembangunan Desa Berdaya Saing*. Ringkasan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Tahun Ke 1 (2016) dari Rencana Tiga Tahun

Dokumen:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Inpres Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021.

SOP Program Sistem Informasi Desa Kabupaten Kuantan Singingi